

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH**

**JI. SOEKARNO HATTA No. 2-4 WONOSOBO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2024 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2024 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga terwujud peningkatan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Wonosobo, 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, MSi

Pembina Utama Madya
NIP 196809251988031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PADA TAHUN 2023	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Lalu/ 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	69
BAB III TUJUAN SASARAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH	70
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah	70
3.3 Program dan Kegiatan	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
BAB V PENUTUP	88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. **Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.**

Berpedoman pada renstra perangkat daerah yang merupakan penjabaran RPJMD dan RKPD maka disusunlah Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja serta upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Sekretariat Daerah disusun guna untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. yaitu ***“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA”***.

Maka untuk mencapai Misi Pertama yaitu ***“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik,***

mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :

1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah
3. Penyelenggaraan kebijakan daerah
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
7. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
8. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
9. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

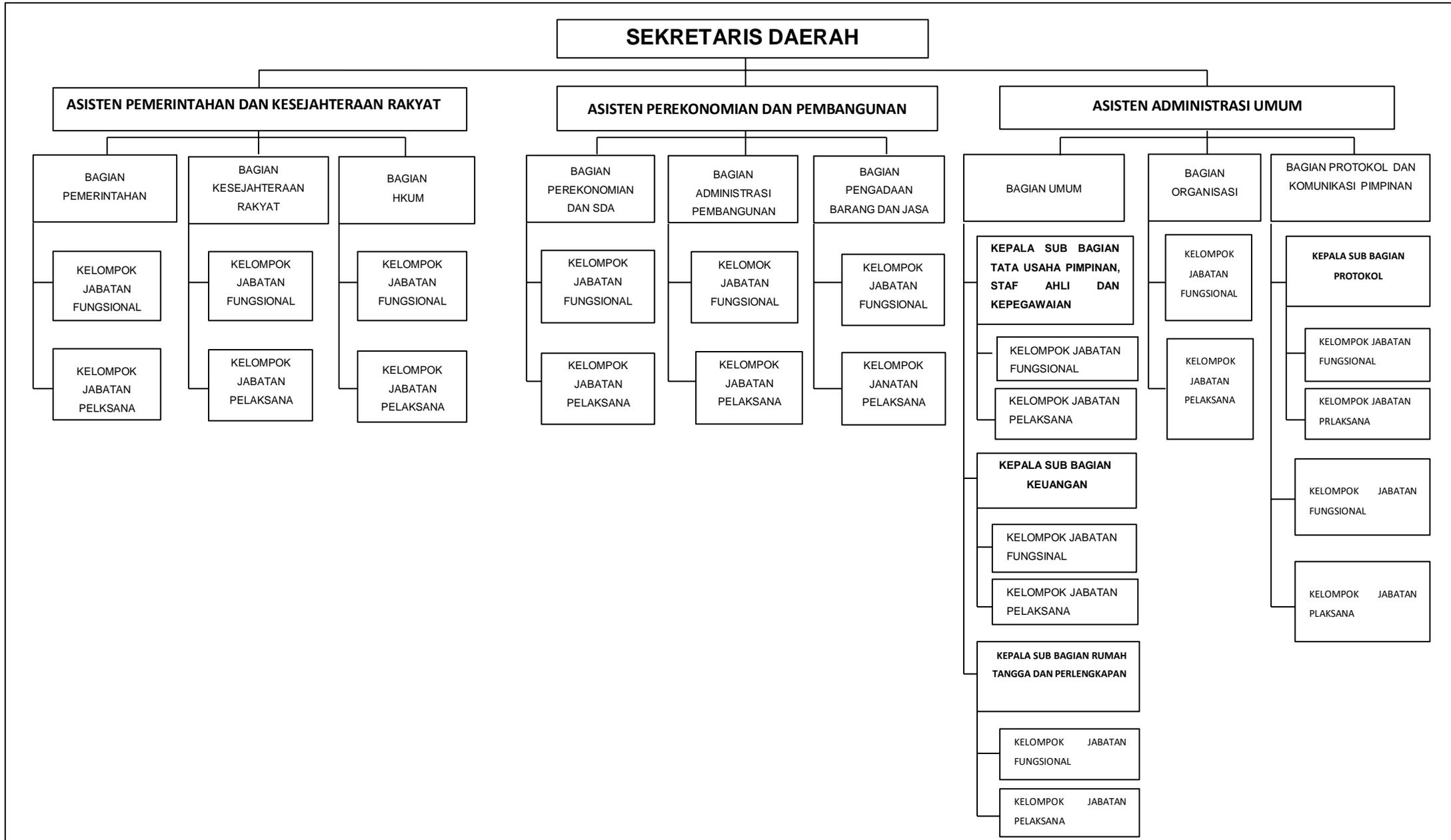
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Bagian Pemerintahan

- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 3) Bagian Hukum
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2) Bagian Organisasi
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a) Sub Bagian Protokol;
- e. Kelompok jabatan fungsional dan
- f. Kelompok jabatan pelaksana

Apabila dilihat dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajiaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**Bab V Penutup**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sekretariat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya atau yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Pelaksanaan Renja Sekretraiat Daerah Tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini, Dimana Sekretariat Daerah Wonosobo sesuai dengan Rensta 2021-2016 memiliki 3 tujuan dan 3 sasaran serta masing-masing tujuan memiliki program, kegiatan serta sub kegiatan

1. Tujuan 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Sasaran. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
 - A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. **Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Tata Pemerintahan)**
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 2. **Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)**
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 3. **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 1. **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonomian dan SDA)**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 2. **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Bagian Perekonomian dan SDA)**
Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 3. **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Bagian Adbang)**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- B. Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)
1. **Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)**
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 2. Tujuan 2. Mewujudkan Pemerintahan yang kapabel
Sasaran. Terwujudnya Pemerintahan yang kapabel
 - A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. **fasilitasi dan koordinasi hukum (Bagan Hukum)**
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi bantuan hukum
 - Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum
 - B. Program Perekonomian dan Pembangunan
 1. **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian PBJ)**
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - C. Program Administrasi Umum/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)
 1. **Penataan Organisas (Bagian Organisasi)**
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3. Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)
 1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 2. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Mebel
- 4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Aset tetap lainnya
- 6. **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 7. **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 8. **Penataan organisasi**
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 9. **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
 - Fasilitasi keprotokolan
 - Fasilitasi komunikasi pimpinan
 - Pendokumentasian tugas pimpinan
- 10. **Penataan Organisasi**
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. **Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Tata Pemerintahan)**
 - Penataan administrasi pemerintahan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (sesuai penempatan logframe)

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel										
4	URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.1	BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/ rencana kerja	100%	100%	100%	70,00%		100%		
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%		100%		

		dengan kebijakan								
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%		100%		
4.01.02.2,01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen		48 Dokumen		
4.01.02.2,01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen		48 Dokumen		
4.01.02.2,01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	307 dokumen		307 dokumen	307 dokumen		307 dokumen		
4.01.02.2,04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	15 Dokumen		15 Dokumen	13 Dokumen		15 Dokumen		
4.01.02.2,04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen		15 Dokumen	13 Dokumen		15 Dokumen		
4.01.02.2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang	100%		100%	100%	100%	100%		

		ditindaklanjuti								
4.01.02.2,02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen		5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		
4.01.02.2,02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	6 Dokumen		6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen		
4.01.02.2,02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	6 Dokumen		6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen		

		Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100%		100%	100%		100%		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%		100%	70,00%		100%		
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%		100%		
		Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%		80%	83,72%		80%		
4.01.03.2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tertangani	100%		100%			100%		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%		100%	70,00%		100%		
4.01.03.2,01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	12		12 Dokumen			12 Dokumen		

	dan BLUD	Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen							
4.01.03.2,01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 Laporan			12 Laporan		
4.01.03.2,04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan yang tertangani	100%		100%			100%		
4.01.03.2,04.01	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12 Dokumen		12 Dokumen			12 Dokumen		
4.01.03.2,04.02	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	100 Dokumen		100 Dokumen			100 Dokumen		
4.01.03.2,02.01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%		80%	83,72%		80%		
4.01.03.2,02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		

		Program Pembangunan Daerah								
4.01.03.2,02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan		4 laporan	4 laporan		4 laporan		
4.01.03.2,02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan		18 Laporan	18 laporan		18 Laporan		
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)									
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71,00 nilai		68 nilai	70,80 nilai		70 nilai		
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	70,00 angka		68 nilai	70,80 nilai		68 angka		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		dokumen					
Tujuan 2. Mewujudkan Pemerintahan yang kapabel										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		Persentase peraturan daerah yang	100%		100%	66,67%		100%		

		ditindaklanjuti dengan peraturan bupati								
4.01.02.2.03	fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	100%		100%			100%		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	dokumen		12 dokumen	12 dokumen		dokumen		
	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3 kasus	3 kasus	1 Kasus		kasus		
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	inp	dokumen		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90 %	60%	70%			85 %		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	77,25%	80,25%	33,50%		%		
		Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	9 Nilai	0	3 nilai			6 nilai		
		Tingkat Kematangan UKPBJ	71,25 Nilai	71,25 nilai	71,25 nilai					

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jas	12 Dokumen		12 dokume n			71,25 nilai		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektroni	12 Dokumen		12 dokume n			12 dokumen		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang		200 orang			200 orang		
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)									
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 Nilai	Nilai 65	68 nilai	70,80%		70 nila		
	Penataan Organisas	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	71 angka	65 angka	68 nilai	70,80%		70 angka		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen		12 dokume n			12 dokumen		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan		12 laporan			12 laporan		
Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
4.1.01	PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN DEARAH KABUPATEN/KOTA (NON URUSAN)									
		Persentase aset Sekretariat Daerah	100%		100%			100%		

		dalam kondisi baik							
		Persentase Pemenuhan Sarpras pendukung kinerja	100%		100%			100%	
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%			100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%		100%			100%	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln		Orang/bln			Orang/bln	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 dokumen			1 dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100%		100%			100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket			7 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	9 Paket		9 Paket			9 Paket	

		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket			5 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket			2 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket			9 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen		9 Dokumen			9 Dokumen	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan		24 Laporan			24 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan		9 Laporan			9 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik	100 %		100%			100%	

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit		3 Unit			3 Unit		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit			3 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit			2 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit			3 Unit		
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	1 Unit		1 Unit			1 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	9 Laporan		9 Laporan			9 Laporan		

		Surat Menyurat							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan		18 Laporan			18 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan			2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa playanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan			8 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%			100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit			3 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit			7 Unit	

	Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit			5 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit			6 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5 Unit		5 Unit			5 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit			2 Unit	
	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit			1 Unit	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100%		100%			100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bln		2 Orang/bln			2 Orang/bln	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas	10 Paket		10 Paket			10 Paket	

	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan								
	Pelaksanaan Medical Check Up kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang			2 Orang		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bln		2 Orang/bln			2 Orang/bln		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%		100%			100%		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket		

	Penataan organisasi	Jumlah kebijakan penataan organisasi yang dipublikasikan	-		100%			-		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		12 dokumen			-		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		12 laporan			-		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan inerja danReformasi Birokrasi	-		12 dokumen			-		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	-	NA	100 angka			-		
		Nilai kepuasan layanan kehumasan	-	NA	100 angka			-		
	Fasilitasi keprotokolan	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		12 laporan			-		
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		12 laporan			-		
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		1 laporan			-		
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)									
		Persentase kegiatan	100%		100%	88,22%		100%		

		pemerintahan daerah yang dipublikasikan								
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 Nilai	63 nilai	68 nilai	70,80%		70 nilai		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	78,20 angka		77,92 angka			78,10 angka		
		Nilai layanan kehumasan	77,00 angka		76,76 angka			76,90 angka		
	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 laporan			12 laporan		
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 laporan			12 laporan		
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 laporan			12 laporan		
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	71,00 Angka	65,00	68,00 angka			70,00 angka		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		12 laporan			laporan		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	100%		100%	97,50%		100%		
	Administrasi Pemerintahan	Tata Jumlah kebijakan administrasi tata	46		46 dokumen	46 dokumen		46 dokumen		

		pemerintahan dipublikasikan	Dokumen							
	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	46 Dokumen		12 dokumen	12 dokumen		46 dokumen		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan sekretariat daerah berdasarkan indikator kinerja Program yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja sekretariat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretraiat Daerah
Kabupaten Wonosobo Provnsi Jawa Tengah

No	Program/Indikator Program	SPM/Stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat											
A.	Bagian Pemerintahan											
	a. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama			100%	100%	100%	100%	70%		100%	100%	
	b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	c. Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar			100%	100%	100%	100%	97,50%		100%	100%	
B.	Bagian Kesejahteraan Rakyat											
	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
C.	Bagian Hukum											
	a. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati			100%	100%	100%	100%	66,67%		100%	100%	

No	Program/Indikator Program	SPM/Stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan											
A.	Bagian Administrasi Pembangunan											
	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagain Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	b. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan			80%	80%	85%	85%	83,72%		85%	85%	
B	Bagian Perekonomian dan SDA											
	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			100%	100%	100%	100%	70,00%		100%	100%	
C	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											
	a. Indeks tata kelola pengadaan			70	85	90	95	33,50		90	95	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)											

No	Program/Indikator Program	SPM/Stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
.	Bagian Umum											
	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	
	b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	
	c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4.	Program Administrasi Umum/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)											
A.	Bagian Organisasi											
	a. Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah			68	68	70	71	70,80		70	71	
B.	Bagian Prokompim											
	a. Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan,			100%	100%	100%	100%	88,22%		100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan renstra tahun 2021 - 2026 terdiri dari empat (4) program

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diampu oleh 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Hukum, dengan jumlah total 5 indikator

- a. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
Capaian kinerja indikator Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama pada tahun 2022 hanya sebesar 70% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, hal ini disebabkan masih adanya beberapa kesepakatan bersama yang belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara lain kesepakatan bersama antara pihak pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. Tirta Investama dan PT. Sarihusada Generasi Mahardhika, antara PT. Indonesia Power Mrica Power Generation Unit dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hal ini dikarenakan proses Kesepakatan Bersama selesai pada akhir Tahun 2022, dan Perangkat Daerah pemrakarsa belum menyiapkan tindak lanjut berupa Perjanjian Kerjasama (PKS). Selanjutnya akan dibahas Perjanjian Kerjasama di Tahun 2023.
- b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan.
Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan telah sesuai dengan target yang telah dtentukan yaitu sebesar 100%, hal ini dikarenakan surat masuk yang sesuai segera ditindaklanjuti sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan
- c. Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar
Pada Indikator Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar dari target kinerja sebesar 100% di tahun 2022 terealisasi sebesar 97,50%, dikarenakan adanya perubahan regulasi, yang tahun sebelumnya berdsarkan Permendagri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan untuk tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan memperhitungkan Mutu Layanan terhadap 6 Urusan wajib Pelayanan Dasar.
- d. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan
Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan telah sesuai dengan target yang telah dtentukan yaitu sebesar 100%, hal ini dikarenakan surat masuk yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesjahteraan Rakyat segera ditindaklanjuti sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan
- e. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Pada indikator Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati capaiannya di tahun 2022 hanya 66,67% artinya belum sesuai dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari 18 Peraturan Daerah yang ada 14 yang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, sedangkan sisanya sejumlah 4 (empat) Peraturan Daerah belum mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Ke 4 (empat) Peraturan Daerah tersebut antara lain: *Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.*

Program Perekonomian dan Pembangunan juga diampu oleh 3 Bagian yakni Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan total 5 indikator.

- a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti
Capaian kinerja indikator persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti sudah sesuai dengan target di tahun 2022 yaitu 100%, ketercapaian ini karena yang ditindaklanjuti sudah sesuai dengan kebijakan atau aturan yang ada sehingga dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator tetap berpedoman kepada kebijakan yang telah ada.
- b. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan
Indikator rata-rata capaian kinerja perangkat daerah di tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83,72% dari target 80%, hal ini dikarenakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dilakukan pemantauan kinerjanya pada setiap triwulan.
- c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan
Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan sebesar 100% sesuai dengan target di tahun 2022 sebesar 100% hal ini karena adanya sinergi yang baik dengan perangkat daerah terkait.
- d. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Capaian kinerja indikator Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP hanya 70,00% dari target 100% di tahun 2022, artinya masih jauh dari target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan target dan capaian opini audit KAP di tahun 2022 masih merupakan hasil audit atas kinerja BUMD tutup buku tahun 2021 sedangkan untuk penilaian tahun 2022 masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
- e. **Indeks tata kelola pengadaan**
Capaian kinerja indeks tata kelola pengadaan pada tahun 2022 dengan nilai 33,50 atau predikat kurang dari target yang telah ditentukan yaitu >70 s.d 90 dengan predikat baik. Rendahnya indeks tata kelola pengadaan disebabkan karena pada indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ di tahun 2022 masih rendah, dari kebutuhan JF PPBJ sebanyak 25 orang hanya terdapat 9 orang pada UKPBJ Kabupaten Wonosobo. Selain hal

tersebut, disebabkan juga pada indikator tingkat kematangan UKPBJ yang belum memenuhi target tingkat kematangan UKPBJ dengan level 3 (proaktif). Capaian kematangan UKPBJ di tahun 2022 masih pada level 1 (inisiasi)

Predikat Indeks tata kelola pengadaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Nilai	Predikat
100	Istimewa
> 90 s.d <100	Sangat Baik
> 70 s.d 90	Baik
≥ 50 s.d 70	Cukup
< 50	Kurang

Sumber data : Bagian PBJ Kabupaten Wonosobo berdasar LKPP

Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Urusan).

Program Administrasi Umum adalah merupakan Program yang diampu oleh 2 (dua) Bagian Yakni Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (prokompim) yang akan dilaksanakan di tahun 2023, namun karena sesuatu hal maka kedua bagian tersebut di tahun 2023 masih menggunakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Urusan). Atinya program tersebut sesuai dengan program di tahun sebelumnya namun di tahun 2023 masuk dalam program urusan. Indikator pada proram ini sebanyak 2.

a. Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator rata-rata nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah di tahun 2022 melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 70,80 angka, dari target nilai yang ditetapkan 68. Hal ini dikarenakan seluruh LKE PMRPB telah diisi secara maksimal selain itu pendampingan implementasi RB tetap terus dilakukan serta menyusun tools paling efektif kepada perangkat daerah secara menyeluruh guna meningkatkan capaian implementasi RB di Kabupaten Wonosobo. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap masih dijumpai adanya hambatan yakni masih kurangnya SDM dalam pendampingan pengisian LKE secara intens terhadap seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo

Secara rinci rata-rata nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Trend Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tahun	RB atas penilaian	Predikat	Keterangan
2019	NA	NA	Belum ada penilaian
2000	NA	NA	Belum ada penilaian
2021	62,15	Baik	
2022	70,80	Sangat baik	

Interval penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>70 - 80	Sangat baik
4.	B	>60 -70	Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup memadai

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Wonosobo berdasar Kementerian PAN RB

b. Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan,

Capaian kinerja indikator Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan di tahun 2022 baru mencapai sebesar 88,22% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM serta sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekretrais Daerah. Namun demikian tetap diusahakan dalam pendampingan kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan substansi kegiatan pemerintahan

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Dalam menjalankan kegiatannya, sekretariat daerah Kabupaten Wonosobo masih banyak menghadapi hambatan/kendala antara lain :

1. Internal

- a. kurang optimalnya kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta penegakan disiplin aparatur yang kurang intensif
- b. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
- d. Penerapan pemanfaatan TI dalam tata kelola administrasi yang kurang maksimal
- e. Kurangnya cepatnya Perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil MOU dengan Perjanjian Kerjasama (PKS)

2. Eksternal

- a. Sering terjadinya perubahan sistem/perubahan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan akibat dari perkembangan dinamika pada sistem pemerintahan
- b. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai penataan birokrasi dan organisasi daerah
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung kinerja daerah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, perlu adanya upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (personel) yang ada diantaranya mutasi pejabat dan staf, pengajuan formasi jabatan yang dibutuhkan di sekretariat daerah, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah
- 2) Penentuan prioritas pemenuhan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang secara signifikan mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU)
- 3) Peningkatan kualitas penyediaan sarana-prasarana melalui pemetaan kebutuhan, penambahan sarana prasarana melalui pengadaan, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana
- 4) Penerapan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan dalam tata kelola pemerintahan guna mendukung kinerja yang efektif dan efisien
- 5) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap Perangkat Daerah yang berkaitan dengan SOP MOU/PKS.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, mewujudkan pemerintahan yang kapabel dan peningkatan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah yang ada di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2.3 (review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretraiat Daerah
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik											
	Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten/Kota (NON URUSAN)				33.500.593.433	Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten/Kota (NON URUSAN)				33.500.593.433	Semua bagian
		Wsb	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100%			Wsb	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100%		
		Wsb	Persentase pemenuhan sarprsa pendukung kinerja	100%			Wsb	Persentase pemenuhan sarprsa pendukung kinerja	100%		
		Wsb	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%			Wsb	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wsb	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	18.568.120.507	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wsb	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	18.568.120.507	Umum
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bln	18.545.395.182	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bln	18.545.395.182	Umum

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Wsb	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	22.725.325	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Wsb	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	22.725.325	Hukum
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wsb	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100%	4.144.316.855	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wsb	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100%	4.144.316.85	Umum,
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wsb	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	93.728.466	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wsb	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	93.728.466	Umum
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	320.387.892	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	320.387.892	Bagian Umum, Pemerintahan, Kesra, Hk, Perekonomian, Pbj. Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Peralatan dan perlengkapan kantor (ATK & Kertas Cover)	1 Paket	62.485.644		Wsb	Peralatan dan perlengkapan kantor (ATK & Kertas Cover)	1 Paket	62.485.644	Umum
		Wsb	perlengkapan kantor (ATK)	1 Paket	24.162.199		Wsb	perlengkapan kantor (ATK)	1 Paket	24.162.199	Pemerintahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kanto	1 Paket	24.994.258		Wsb	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kanto	1 Paket	24.994.258	Kesra
		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	24.994.258		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	24.994.258	Hukum
		Wsb	Tersedianya ATK	1 Paket	16.246.267		Wsb	Tersedianya ATK	1 Paket	16.246.267	Perekonomian
		Wsb	Pengadaan ATK	1 Paket	27.212.498		Wsb	Pengadaan ATK	1 Paket	27.212.498	PBJ
		Wsb	Pembelian ATK	1 Paket	31.242.822		Wsb	Pembelian ATK		31.242.822	Adbang
		Wsb	ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, pigura dan souvenir	1 Paket	80.306.550		Wsb	ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, pigura dan souvenir	1 Paket	80.306.550	Prokompim
		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	28.743.396		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	28.743.396	Organisasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wsb	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	81.231.337	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wsb	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	81.231.337	Umum
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wsb	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	2 Paket	18.745.693	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wsb	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	2 Paket	18.745.693	Umum
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	Wsb	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	243.008.170	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	Wsb	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	243.008.170	Bag. Umum, Pemerintahan, Kesra, Hk, Perekonomian,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	30.188.441		Wsb	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	30.188.441	Umum
		Wsb	Fotocopi, belanja penyediaaan bahan undangan hari jadi	1 Paket	21.495.062		Wsb	Fotocopi, belanja penyediaaan bahan undangan hari jadi	1 Paket	21.495.062	Pemerintahan
		Wsb	Barang cetakan dan penggandaa	1 Paket	16.246.267		Wsb	Barang cetakan dan penggandaa	1 Paket	16.246.267	Kesra
		Wsb	Penyediaan cetak keperluan kantor	1 Paket	24.994.258		Wsb	Penyediaan cetak keperluan kantor	1 Paket	24.994.258	Hukum
		Wsb	cetak dan penggandaan	1 Paket	18.745.693		Wsb	cetak dan penggandaan	1 Paket	18.745.693	Perekonomian
		Wsb	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	25.933.042		Wsb	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	25.933.042	PBJ
		Wsb	Cetak dan fotocopy	1 Paket	18.745.693		Wsb	Cetak dan fotocopy	1 Paket	18.745.693	Adbang
		Wsb	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	35.616.817		Wsb	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	35.616.817	Prokompim
		Wsb	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	24.994.258		Wsb	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	24.994.258	Organisasi
	Penyediaan Bahan Bacaan	Wsb	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	9 Doku	89.054.540	Penyediaan Bahan Bacaan	Wsb	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	9 Doku	89.054.540	Bag. Umum, Pemerintahan,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Peraturan Perundang- undangan		Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	men		dan Peraturan Perundang- undangan		Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	men		Kesra, Hk, Perekonomian,P BJ, Adbang, Prokompim, Organisasi.
		Wsb	jumlah Bahan Bacaan Mass Media Nasional dan Lokal	1 Doku men	43.739.951		Wsb	jumlah Bahan Bacaan Mass Media Nasional dan Lokal	1 Doku men	43.739.951	Umum
		Wsb	langganan Kompas dan Suara Merdeka	1 Doku men	2.999.311		Wsb	langganan Kompas dan Suara Merdeka	1 Doku men	2.999.311	Pmerintahan
		Wsb	Koran, bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	1.649.621		Wsb	Koran, bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	1.649.621	Kesra
		Wsb	Penyediaan buku peraturan perundang- undangan dan langganan koran	1 Doku men	17.271.032		Wsb	Penyediaan buku peraturan perundang- undangan dan langganan koran	1 Doku men	17.271.032	Hukum
		Wsb	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	2.474.432		Wsb	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	2.474.432	Perekonomian
		Wsb	Bahan bacaan surat kabar najalah	1 Doku men	3.124.282		Wsb	Bahan bacaan surat kabar najalah	1 Doku men	3.124.282	PBJ

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Bahan bacaan (koran)	1 Dokumen	2.499.426		Wsb	Bahan bacaan (koran)	1 Dokumen	2.499.426	Adbang
		Wsb	Jawa Pos, KR, Republika Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	1 Dokumen	11.547.347		Wsb	Jawa Pos, KR, Republika Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	1 Dokumen	11.547.347	Prokompim
		Wsb	Penyediaan koran/surat kabar	1 Dokumen	3.749.139		Wsb	Penyediaan koran/surat kabar	1 Dokumen	3.749.139	Organisasi
	Penyediaan Bahan/Material	Wsb	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	93.728.466	Penyediaan Bahan/Material	Wsb	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	93.728.466	Umum
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Wsb	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	1.124.741.594	Fasilitas Kunjungan Tamu	Wsb	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	1.124.741.594	Umum
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wsb	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	2.079.690.697	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wsb	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	2.079.690.697	Bag.Umum, Pemerintahan, Kesra, Hk, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Jumlah perjalanan dinas pimpinan di dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	687.342.085		Wsb	Jumlah perjalanan dinas pimpinan di dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	687.342.085	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	uang lembur, makan minum rapat	1 Laporan	332.136.193		Wsb	uang lembur, makan minum rapat	1 Laporan	332.136.193	Pmerintahan
		Wsb	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	74.982.773		Wsb	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	74.982.773	Kesra
		Wsb	Perjalanan dinas luar daerah, makan minum rapat	1 Laporan	174.959.803		Wsb	Perjalanan dinas luar daerah, makan minum rapat	1 Laporan	174.959.803	Hukum
		Wsb	Terselenggaranya rapat koordinasi, terselenggaranya rapat koordinasi luar daerah	1 Laporan	193.644.511		Wsb	Terselenggaranya rapat koordinasi, terselenggaranya rapat koordinasi luar daerah	1 Laporan	193.644.511	Perekonomian
		Wsb	Laporan Koordinasi dan/konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum rapat	1 Laporan	162.462.675		Wsb	Laporan Koordinasi dan/konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum rapat	1 Laporan	162.462.675	PBJ
		Wsb	makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah	1 Laporan	137.468.417		Wsb	makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah	1 Laporan	137.468.417	Adbang
		Wsb	Penyediaan makanan dan minuman, rapat kooerdinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	162.462.675		Wsb	Penyediaan makanan dan minuman, rapat kooerdinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	162.462.675	Prokompim
		Wsb	Penyelenggaraan	1	154.231.566		Wsb	Penyelenggaraan	1	154.231.566	Organisasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			rapat rapat dan perjalanan dinas	Laporan				rapat rapat dan perjalanan dinas	Laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wsb	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.581.286.704	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wsb	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.581.286.704	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	444.047.981	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	444.047.981	Bag. Umum, PBJ, Prokompim
		Wsb	Jumlah Pengadaan Personal Computer	1 Unit	62.485.644		Wsb	Jumlah Pengadaan Personal Computer	1 Unit	62.485.644	Umum
		Wsb	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi	1 Unit	265.439.016		Wsb	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi	1 Unit	265.439.016	PBJ
		Wsb	jumlah laptop, Lcd, LED TV, printer, scanner, sound mini portable, stand Bracket Mobile	1 Unit	116.123.321		Wsb	jumlah laptop, Lcd, LED TV, printer, scanner, sound mini portable, stand Bracket Mobile	1 Unit	116.123.321	Prokompim
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	749.827.729	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	749.827.729	Umum
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan	2 Unit	249.942.576	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan	2 Unit	249.942.576	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	124.971.288	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	124.971.288	Umum
	Pengadaan Mebel	Wsb	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	1 Unit	12.497.129	Pengadaan Mebel	Wsb	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	1 Unit	12.497.129	Adbang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.867.040.433	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.867.040.433	Umum
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 laporan	30.492.994	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 laporan	30.492.994	Bag. Umum, Kesra, Hk, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Jumlah administrasi surat menyurat tertangani	1 Laporan	15.621.411		Wsb	Jumlah administrasi surat menyurat tertangani	1 Laporan	15.621.411	Umum
		Wsb	Materai, amplop	1 Laporan	4.249.024		Wsb	Materai, amplop	1 Laporan	4.249.024	Kesra
		Wsb	Penyediaan benda pos	1 Laporan	1.874.569		Wsb	Penyediaan benda pos	1 Laporan	1.874.569	Hukum
		Wsb	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	2.499.426		Wsb	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	2.499.426	Perekonomian
		Wsb	Pembelian materai	1 Laporan	1.249.713		Wsb	Pembelian materai	1 Laporan	1.249.713	PBJ
		Wsb	Pembelian materai	1 Laporan	1.874.569		Wsb	Pembelian materai	1 Laporan	1.874.569	Adbang
		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan, jasa surat menyurat	1 Laporan	1.874.569		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan, jasa surat menyurat	1 Laporan	1.874.569	Prokompim
		Wsb	Penyediaan materai	1 Laporan	1.249.713		Wsb	Penyediaan materai	1 Laporan	1.249.713	Organisasi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	18 Laporan	681.098.080		Wsb	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18 Laporan	681.098.080	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	93.728.467	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	93.728.467	Bag. Umum, Organisasi
		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	68.734.209		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	68.734.209	Umum
		Wsb	Penyediaan LCD, penyediaan peralatan komputer lainnya, penyediaan printer	1 Laporan	24.994.258		Wsb	Penyediaan LCD, penyediaan peralatan komputer lainnya, penyediaan printer	1 Laporan	24.994.258	Organisasi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	3.061.702.893	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	3.061.702.893	Bag. Umum, Pmerintahan, Kesra, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor dan Jasa transaksi	1 Laporan	2.745.442.367		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor dan Jasa transaksi	1 Laporan	2.745.442.367	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			keuangan					keuangan			
		Wsb	Honorarium pengelola uang dan penatausahaan, iuran forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Laporan	66.234.783		Wsb	Honorarium pengelola uang dan penatausahaan, iuran forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Laporan	66.234.783	Pemerintahan
		Wsb	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	1 Laporan	92.579.920		Wsb	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	1 Laporan	92.579.920	Kesra
		Wsb	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Laporan	27.493.683		Wsb	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Laporan	27.493.683	Perekonomian
		Wsb	honorarium pengelola uang dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	50.613.372		Wsb	honorarium pengelola uang dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	50.613.372	PBJ
		Wsb	Honor pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	24.994.258		Wsb	Honor pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	24.994.258	Adbang
		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan	1 Laporan	31.867.678		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan	1 Laporan	31.867.678	Prokompim
		Wsb	honorarium pengelola keuangan (KPA, Bendahara)	1 Laporan	22.494.832		Wsb	honorarium pengelola keuangan (KPA, Bendahara)	1 Laporan	22.494.832	Organisasi
	Pemeliharaan	Wsb	Persentase realisasi	100%	2.292.797.186	Pemeliharaan	Wsb	Persentase realisasi	100%	2.292.797.186	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wsb	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	478.214.082	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wsb	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	478.214.082	Bag. Umum, Pemerintahan, Hukum
		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Perseorangan Dinas/Jabatan Terpeliharaan	1 Unit	406.156.687		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Perseorangan Dinas/Jabatan Terpeliharaan	1 Unit	406.156.687	Umum
		Wsb	BBM, pelumas, pemeliharaan alat mesin/service komputer, pemeliharaan kendaraan dinas	1 Unit	34.566.009		Wsb	BBM, pelumas, pemeliharaan alat mesin/service komputer, pemeliharaan kendaraan dinas	1 Unit	34.566.009	Pemerintahan
		Wsb	Pemeliharaan suku cadang, BBM kendaraan roda 4	1 Unit	37.491.386		Wsb	Pemeliharaan suku cadang, BBM kendaraan roda 4	1 Unit	37.491.386	Hukum

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan 2					dan 2			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wsb	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	743.579.165	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wsb	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	743.579.165	Bagian Umum, Kesra, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Dinas Operasional Bagian Umum	1 Unit	531.127.975		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Dinas Operasional Bagian Umum	1 Unit	531.127.975	Umum
		Wsb	Terpeliharnya kendaraan dinas/operasional	1 Unit	24.994.258		Wsb	Terpeliharnya kendaraan dinas/operasional	1 Unit	24.994.258	Kesra
		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas	1 Unit	16.246.267		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas	1 Unit	16.246.267	Perekonomian
		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Unit	21.245.119		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Unit	21.245.119	PBJ
		Wsb	Perawatan kendaraan bermotor	1 Unit	43.739.951		Wsb	Perawatan kendaraan bermotor	1 Unit	43.739.951	Adbang
		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	62.485.644		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	62.485.644	Prokompim

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4	1 Unit	43.739.951		Wsb	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4	1 Unit	43.739.951	Organisasi
	Pemeliharaan Mebel	Wsb	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	81.231.337	Pemeliharaan Mebel	Wsb	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	81.231.337	Umum
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	164.962.100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	164.962.100	Bag. Umum, Kesra, Hukum, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim.
		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan peralatan kantor, alat studio dan komunikasi	1 Unit	62.485.644		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan peralatan kantor, alat studio dan komunikasi	1 Unit	62.485.644	Umum
		Wsb	Terpeliharanya peralatan perkantoran	1 Unit	13.746.842		Wsb	Terpeliharanya peralatan perkantoran	1 Unit	13.746.842	Kesra
		Wsb	Pemeliharaan suku cadang dan perlengkapan peralatan kantor	1 Unit	12.497.129		Wsb	Pemeliharaan suku cadang dan perlengkapan peralatan kantor	1 Unit	12.497.129	Hukum
		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	6.248.564		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	6.248.564	Perekonomian

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	1 Unit	24.994.258		Wsb	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	1 Unit	24.994.258	PBJ
		Wsb	jasa service dan penggantian komponen	1 Unit	24.994.258		Wsb	jasa service dan penggantian komponen	1 Unit	24.994.258	Adbang
		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	19.995.406		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	19.995.406	Prokompim
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5 Unit	687.342.085	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5 Unit	687.342.085	Umum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	106.225.595	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	106.225.595	Bag.Umum, Organisasi.
		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan Sarana & Prasarana Ged. Kantor	1 Unit	93.728.466		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan Sarana & Prasarana Ged. Kantor	1 Unit	93.728.466	Umum
		Wsb	pemeliharaan komputer dan printe	1 Unit	12.497.129		Wsb	pemeliharaan komputer dan printe	1 Unit	12.497.129	Organisasi
	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Wsb	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	1 Unit	31.242.828		Wsb	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang		31.242.828	PBJ

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dipelihara					Dipelihara			
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100%	1.249.886.751	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100%	1.249.886.751	Umum
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang /Bln	355.944.841	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang /Bln	355.944.841	Umum
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	148.003.628	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	148.003.628	Umum
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	35.520.871	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	35.520.871	Umum
	Penyediaan Dana	Wsb	Jumlah Orang yang	2	710.417.412	Penyediaan Dana	Wsb	Jumlah Orang yang	2	710.417.412	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bln		Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bln		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Wsb	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%	1.790.582.369	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Wsb	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%	1.790.582.369	Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	687.342.085	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	687.342.085	Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	562.370.797	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	562.370.797	Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	540.869.487	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	540.869.487	Umum
	Penataan organisasi	Wsb	Jumlah kebijakan penataan organisasi yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Kelembagaan dan	Wsb	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Jabatan		yang dihasilkan								
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Jumlah Dokumen Peningkatan inerja danReformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Wsb	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	
		Wsb	Nilai kepuasan layanan kehumasan	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi keprotokolan	Wsb	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	
	Program penunjang urusan	Wsb			200.419.668	Program penunjang urusan	Wsb			200.419.668	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)					pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)					
		WSb	Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	100%			WSb	Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	100%		
		Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai			Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Wsb	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	78,20 angka	68.364.803	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Wsb	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	78,20 angka	68.364.803	
		Wsb	Nilai layanan kehumasan	77,00 angka			Wsb	Nilai layanan kehumasan	77,00 angka		
	Fasilitasi keprotokolan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	5000.000	Fasilitasi keprotokolan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	5000.000	
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		14.999.709	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		14.999.709	
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Pendokumen		48.365.094	Pendokumentasian tugas pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Pendokumen		48.365.094	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			tasian Tugas Pimpinan					tasian Tugas Pimpinan			
	Penataan Organisasi	Wsb	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	71,00 angka	132.054.865	Penataan Organisasi	Wsb	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	71,00 angka	132.054.865	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Lapora n	44.568.517	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Lapora n	44.568.517	
	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				2.940.874.561	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				2.940.874.561	
		Wsb	Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasa	100%			Wsb	Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasa	100%		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokum en	163.037.729	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokum en	163.037.729	
	Penataan administrasi pemerintahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	46 dokum en	163.037.729	Penataan administrasi pemerintahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	46 dokum en	163.037.729	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel											
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				2.940.874.561	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				2.940.874.561	
		Wsb	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/rencana kerja	100%							
		Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100%							
		WSb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian	100%							(

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan								
	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 Dokumen	163.037.729	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 Dokumen	163.037.729	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	48 Dokumen	81.518.865	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	48 Dokumen	81.518.865	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	307 Dokumen	81.518.865	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	307 Dokumen	81.518.865	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Wsb	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	15 Dokumen	81.518.865	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Wsb	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	15 Dokumen	81.518.865	
	Fasilitasi kerjasama Dalam negeri	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	81.518.865	Fasilitasi kerjasama Dalam negeri	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	81.518.865	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang	100%	2.207.204.779	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang	100%	2.207.204.779	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ditindaklanjuti					ditindaklanjuti			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	1.962.648.185	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	1.962.648.185	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	163.037.729	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	163.037.729	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	6 Dokumen	81.518.865	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	6 Dokumen	81.518.865	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
	Program Perekonomian Dan Pembangunan				3.906.119.893	Program Perekonomian Dan Pembangunan				3.906.119.893	
		Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 %			Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 %		
		Wsb	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%			Wsb	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%		
		Wsb	persentase rekomendasi hasil	100%			Wsb	persentase rekomendasi hasil	100%		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti					koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti			
		Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%			Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Wsb	Jumlah kebijakan perekonomian yang ditangani	100%	1.472.754.251	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Wsb	Jumlah kebijakan perekonomian yang ditangani	100%	1.472.754.251	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Wsb	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12 Dokumen	101.898.581	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Wsb	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12 Dokumen	101.898.581	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	1.370.855.670	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	1.370.855.670	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Wsb	Persentase kebijakan yang tertangani	100%	1.831.850.820	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Wsb	Persentase kebijakan yang tertangani	100%	1.831.850.820	
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	12 Dokumen	1.770.711.672	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	12 Dokumen	1.770.711.672	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelautan dan Perikanan		Pembentukan BLUD			Kelautan dan Perikanan		Pembentukan BLUD			
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	61.139.184	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	61.139.184	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%	340.664.074	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%	340.664.074	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	39.859.464	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	39.859.464	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	137.766.881	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	137.766.881	
	Pengelolaan dan Evaluasi	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	18 Laporan	163.037.729	Pengelolaan dan Evaluasi	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	18 Laporan	163.037.729	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	n		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	n		
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)				200.419.668	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)				200.419.668	
		Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai			Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai		
	Penataan Organisasi	Wsb	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	70 angla	132.054.865	Penataan Organisasi	Wsb	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	70 angla	132.054.865	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	42.917.831	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	42.917.831	
Tujuan 2. Mewujudkan pemerintahan yang kapabel											
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				2.940.874.561	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				2.940.874.561	
		Wsb	Persentase peraturan daerah yang	100 %			Wsb	Persentase peraturan daerah yang	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ditindaklanjuti dengan peraturan bupati					ditindaklanjuti dengan peraturan bupati			
	fasilitasi dan koordinasi hukum	Wsb	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	100%	326.075.459	fasilitasi dan koordinasi hukum	Wsb	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	100%	326.075.459	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Wsb	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Doku men	101.898.581	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Wsb	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Doku men	101.898.581	
	Fasilitasi bantuan hukum	Wsb	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	114.126.411	Fasilitasi bantuan hukum	Wsb	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	114.126.411	
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Wsb	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Doku men	110.050.467	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Wsb	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Doku men	110.050.467	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan				3.906.119.893	Program Perekonomian Dan Pembangunan				3.906.119.893	
		Wsb	Indeks tata Kelola Pengadaan	90 %			Wsb	Indeks tata Kelola Pengadaan	90 %		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	260.850.748	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	260.850.748	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	110.050.467	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	110.050.467	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	44.668.751	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	44.668.751	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	106.131.529	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	106.131.529	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)				200.419.668	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				200.419.668	
		Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai			Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai		
	Penataan Organisasi	Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 angka	132.054.865	Penataan Organisasi	Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 angka	132.054.865	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaia n	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Wsb	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	44.568.517	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	44.568.517	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	44.568.517	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	44.568.517	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 tidak menangani secara langsung program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2024 tema pembangunan nasional adalah: ***“adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***.

Sedangkan untuk tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ***“Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”***

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema indikatif pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 adalah: ***“Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah”***

Daya Saing Daerah adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan Daya Saing daerah didukung dari beberapa aspek, antara lain ketersediaan infrastruktur, kualitas kelembagaan birokrasi, stabilitas ekonomi makro dan sumber daya manusia

Terkait dengan Kebijakan Nasional Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo salah satu fungsinya sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan koordinasi tugs perangkat daerah, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah ikut mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2. Mewujudkan pemerintahan yang kapabel

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Dengan indikator kinerja :

- a. Nilai SAKIP
- b. Persentase penanganan anggaran kemiskinan

2. Terwujudnya pemerintahan yang kapabel

Dengan indikator kinerja :

- a. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
- b. Nilai kematangan Organisasi Daerah (NKOD)
- c. Persentase penerapan TNDE

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase ketercapaian SPM
- b. IKM

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini mengikuti perubahan regulasi yang sangat frontal terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hal ini disebabkan karena kebijakan serta pertimbangan agar program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan target yang ditetapkan dapat tercapai, program kegiatan tahun 2024 tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)
 1. **Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (**umum**)
 - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Vrifikasi Keuangan SKPD (**Hukum**)
 2. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (**Umum**)
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (**Umum**)

- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (**Umum**)
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - g. Penyediaan Bahan/Material (**Umum**)
 - h. Fasilitas Kunjungan Tamu (**Umum**)
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
3. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan mebel (**PBJ**)
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (**Umum, Adbang, PBJ**)
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (**Umum**)
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (**Umum**)
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (**Umum**)
 - f. Pengadaan aset tak berwujud (**PBJ**)
 4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat (**Umum, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (**Umum**)
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (**Umum, Organisasi**)
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 5. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (**Umum, Pemerintahan, Hukum**)
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (**Umum, Kesra, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - c. Pemeliharaan Mebel (**Umum**)
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (**Umum, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Prokompim**)
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (**Umum**)
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya (**Umum, Organisasi**)
 6. **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Umum**)
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Umum**)
 - c. Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Umum**)
 - d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Umum**)
 7. **Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bagian Umum)**
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (**Umum**)
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (**Umum**)
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (**Umum**)
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan masyarakat
 1. **Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Pemerintahan)**
 - a. Penataan Administrasi Pemerintahan
 - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - c. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
 2. **Fasilitas Kerjasama Daerah (Bagian Pemerintahan)**

- a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- 3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra)**
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
- 4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum)**
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- 3. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonmian & SDA)**
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Bagian Perekonomian & SDA)**
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Bagian Adbang)**
 - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - 4. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian PBJ)**
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 4. Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)
 - 1. Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)**
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Prokompim)**
 - a. Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Untuk lebih jelasnya tentang target dan kebutuhan dana tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo (Sesuai penempatan Logframe)

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel									
1.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		WSb		2.940.874.561	PAD			2.960.702.916
		Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/ rencana kerja	WSb	100%		PAD			
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Wsb	100%		PAD			
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Wsb	100%		PAD			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	Wsb	48 Dokumen	163.037.729	PAD		48 Dokumen	164.136.984
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Wsb	48 Dokumen	81.518.865	PAD		48 Dokumen	82.068.492
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Jumlah Dokumen Hasil	Wsb	307	81.518.865	PAD		307	82.068.492

	Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Dokumen				Dokumen	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	Wsb	15 Dokumen	81.518.865	PAD		15 Dokumen	82.068.492
	Fasilitasi kerjasama Dalam negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Wsb	15 Dokumen	81.518.865	PAD		15 Dokumen	82.068.492
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Wsb	100%	2.207.204.779	PAD		100%	2.222.086.488
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Wsb	5 Dokumen	1.962.648.185	PAD		5 Dokumen	1.975.881.012
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Wsb	6 Dokumen	163.037.729	PAD		6 Dokumen	164.136.984
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Wsb	6 Dokumen	81.518.865	PAD		6 Dokumen	82.068.492
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan		Wsb		3.906.119.893	PAD			3.932.456.253

		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Wsb	100%		PAD		100%	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Wsb	100%		PAD		100%	
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Wsb	100%		PAD		100%	
		Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	Wsb	85%		PAD		85%	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tertangani	Wsb	100%	1.472.754.251	PAD		100%	1.482.684.050
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Wsb	100%	1.472.754.251	PAD		100%	1.482.684.050
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Wsb	12 Dokumen	101.898.581	PAD		12 Dokumen	102.585.615
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Wsb	12 Laporan	1.370.855.670	PAD		12 Laporan	1.380.098.435
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan yang tertangani	Wsb	100%	1.831.850.820	PAD		100%	1.844.201.768
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Wsb	12 Dokumen	1.770.711.672	PAD		12 Dokumen	1.782.650.399
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Wsb	100	61.139.148	PAD		100	61.551.369

	Lingkungan Hidup	dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		Dokumen				Dokumen	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	Wsb	85%	340.664.074	PAD		85%	342.960.945
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Wsb	2 Dokumen	39.859.464	PAD		2 Dokumen	40.128.210
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Wsb	4 Laporan	137.766.881	PAD		4 Laporan	138.695.751
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Wsb	18 Laporan	163.037.729	PAD		18 Laporan	164.136.984
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)		Wsb		200.419.668	PAD			201.770.96471,0
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71,00 nilai				73.00 nilai	
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	70,00 angka	132.054.865	PAD		71,00 angka	132.945.222
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Dokumen	42.917.831	PAD		Dokumen	43.207.197
Tujuan 2. Mewujudkan Pemerintahan yang kapabel									

1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		WSb		2.940.874.561	PAD		2.960.702.916
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Wsb	100%			100%	
	fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	Wsb	100%	326.075.459	PAD	100%	328.273.968
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Wsb	Dokumen	101.898.581	PAD	Dokumen	102.585.615
	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Wsb	Kasus	114.126.411	PAD	Kasus	114.895.889
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Wsb	Dokumen	110.050.467	PAD	Dokumen	110.792.464
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan				3.906.119.893	PAD		3.932.456.253
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Wsb	90 %			95%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Wsb	%	260.850.748	PAD	%	262.609.490
		Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Wsb	9 Nilai	260.850.748		12 Nilai	262.609.40
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Wsb	71,25 Nilai	260.850.748	PAD	71,5 Nilai	262.609.490
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jas	WSb	12 Dokumen	110.050.467	PAD	12 Dokumen	110.792.464
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektroni	Wsb	12 Dokumen	44.668.751	PAD	12 Dokumen	44.969.923
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	Wsb	200 Orang	106.131.529	PAD	200 Orang	106.847.103

		Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)				200.419.668	PAD			201.770.964
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71 Nilai				73 Nilai	
	Penataan Organisas	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71 angka	132.054.865	PAD		73 angka	132.945.222
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Wsb	12 Dokumen	44.568.517	PAD		12 Dokumen	44.869.013
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	12 Laporan	44.568.517	PAD		12 Laporan	44.869.013
Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)				33.500.593.433	PAD			33.991.504.294
		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Wsb	100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Sarpras pendukung kinerja	Wsb	100%				100%	
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Wsb	100%				100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Wsb	100%	18.568.120.507	PAD		100%	18.840.213.957
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Wsb	Orang/bln	18.545.395.182	PAD		Orang/bln	18.817.155.619
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen	Wsb	1 Dokumen	22.725.325	PAD		1 Dokumen	23.058.388

	Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	Wsb	100%	4.144.316.855	PAD		100%	4.205.046.830
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Wsb	7 Paket	93.728.466	PAD		7 paket	95.101.944
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Wsb	9 Paket	320.387.892	PAD		9 Paket	325.082.791
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Wsb	5 Paket	81.231.337	PAD		5 Paket	82.421.685
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Wsb	2 Paket	18.745.693	PAD		2 Paket	19.020.389
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Wsb	9 Paket	243.008.170	PAD		9 Paket	246.569.162
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Wsb	9 Dokumen	89.054.540	PAD		9 Paket	90.359.527
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Wsb	1 Paket	93.728.466	PAD		1 Paket	95.101.944
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Wsb	24 Laporan	1.124.741.594	PAD		24 Laporan	1.141.223.328
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wsb	9 Laporan	2.079.690.697	PAD		9 Laporan	2.110.166.060
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik	Wsb	100 %	1.581.286.704	PAD		100%	1.604.458.557

	Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Wsb	3 Unit	444.047.981	PAD		3 Unit	450.554.970
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wsb	3 Unit	749.827.729	PAD		3 Unit	760.815.552
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wsb	2 Unit	249.942.576	PAD		2 Unit	253.605.184
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wsb	3 Unit	124.971.288	PAD		3 Unit	126.802.592
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	Wsb	1 Unit	12.497.129	PAD		1 Unit	12.680.259
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	100%	3.867.040.433	PAD		100%	3.923.707.255
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wsb	9 Laporan	30.492.994	PAD		9 Laporan	30.939.832
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	WSb	18 Laporan	681.098.080	PAD		18 Laporan	691.078.752
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Wsb	2 Laporan	93.728.467	PAD		2 Laporan	95.101.944
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa playanan Umum Kantor yang Disediakan	Wsb	8 Laporan	3.061.702.893	PAD		8 Laporan	3.106.586.726

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	100%	2.292.797.186	PAD		100%	2.326.395.368
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Wsb	3 Unit	478.214.082	PAD		3 Unit	485.221.733
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Wsb	7 Unit	743.579.165	PAD		7 Unit	754.475.422
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Wsb	5 Unit	81.231.337	PAD		5 Unit	82.421.685
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Wsb	6 Unit	164.962.100	PAD		6 Unit	167.379.421
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Wsb	5 Unit	687.342.085	PAD		5 Unit	697.414.256
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Wsb	2 Unit	106.225.595	PAD		2 Unit	107.782.203
	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Wsb	1 Unit	31.242.828	PAD		1 Unit	31.700.648
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	Wsb	100%	1.249.886.751	PAD		100%	1.268.202.336
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Wsb	2 Orang/bln	355.944.841	PAD		2 Orang/bln	361.160.784

		Daerah							
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Wsb	10 Paket	148.003.628	PAD		10 Paket	150.172.442
	Pelaksanaan Medical Check Up kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	2 Orang	35.520.871	PAD		2 Orang	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	2 Orang/bln	710.417.412	PAD		2 Orang/bln	720.827.724
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Wsb	100%	1.790.582.369	PAD		100%	1.816.821.197
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Wsb	1 Paket	687.342.085	PAD		1 Paket	697.414.256
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Wsb	1 Paket	562.370.797	PAD		1 Paket	570.611.664
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Wsb	1 Paket	540.869.487	PAD		1 Paket	548.795.278
	Penataan Organisasi	Jumlah kebijakan penataan organisasi yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	-	-	-	-	-	-	-

		Reformasi Birokras							
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	-	-	-	-	-	-	-
		niali kepuasan layanan kehumasan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi pimpinan	-	-	-	-	-	-	-
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)				200.419.668	PAD			201.770.964
		Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	Wsb	100%				100%	
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71 Nilai				73 Nilai	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	WSb	78,20 angka	68.364.803			78,30 angka	68.825.742
		Nilai layanan kehumasan	Wsb	77,00 angka				77,10 angka	
	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Wsb	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.000.000
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Wsb	12 Laporan	14.999.709	PAD		12 Laporan	15.134.554
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Wsb	12 Laporan	48.365.094	PAD		12 Laporan	48.691.188
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71,00 Angka	132.054.865	PAD		73,00 angka	132.945.222
	Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil	Wsb	Laporan	44.568.517	PAD		Laporan	44.869.013

	danTata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
3.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Wsb		2.940.874.561	PAD			2.960.702.916
		Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	WSb						
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kebijakan administrasi pemerintahan dipublikasikan tata	Wsb	46 Dokumen	163.037.729	PAD		46 Dokumen	164.136.984
	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Wsb	46 Dokumen	163.037.729	PAD		46 Dokumen	164.136.984

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah sebagai berikut pada lampiran berikut ini :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Non Urusan), dengan anggaran sebesar Rp13.611.465.263,00- terdiri dari:
 - a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp 0,
 - b. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp4.148.228.031,00-
 - c. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran Rp46.000.000,00-
 - d. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp4.887.275.153,00-
 - e. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp2.329.962.079,00-
 - f. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggaran Rp250.000.000,00-
 - g. Kegiatan fasilitasi kerumah tanggaan sekretariat daerah Rp1.950.000.000,00-
2. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Urusan),/ (Program Administrasi Umum) dengan anggaran sebesar Rp527.426.760,00- terdiri dari:
 - a. Kegiatan penataan organisasi dengan anggaran Rp240.075.000,00-
 - b. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan anggaran Rp287.351.760,00-
3. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran sebesar Rp1.097.713.311,00- terdiri dari:
 - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan dengan anggaran Rp421.348.177,00-
 - b. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dengan anggaran Rp68.365.134,00-
 - c. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan anggaran Rp243.000.000,00-
 - d. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum dengan anggaran Rp365.000.000,00-
4. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp1.083.013.976,00- terdiri dari:
 - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan anggaran Rp425.000.000,00-
 - b. Kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam dengan anggaran Rp50.000.000,00-
 - c. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan dengan anggaran Rp324,916.086,00-
 - d. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran Rp283.097.890,00-

L
A
M
P
I
R
A
N

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo maupun dengan Perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.